



UNIVERSITAS INDONESIA

ISLAM DAN NEGARA

**Studi Kasus Perumusan Perda Nomor 12 Tahun 2009 Kota Tasikmalaya
dan Peran Politik Muhammadiyah dan NU**

DISERTASI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
gelar Doktor dalam Ilmu Politik**

**MA'MUN MUROD
0906649185**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ma'mun Murod

NPM : 0906649185

Tanda tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh :

Nama : Ma'mun Murod
NPM : 0906649185
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Disertasi : ISLAM DAN NEGARA: Studi Kasus Perumusan Perda Nomor 12 Tahun 2009 Kota Tasikmalaya dan Peran Muhammadiyah dan NU.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Promotor : Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA.



Ko-Promotor : Chusnul Mar'iyah, Ph.D.



Tim Penguji : Dr. Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc. (Ketua) ()

Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA. (Anggota) ()



Prof. Burhan Djabir Magenda, MA., Ph.D. (Anggota) ()



Dr. Isbodroini Suyanto, MA. (Anggota)



Dr. Kamarudin, M.Si. (Anggota)



Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 Juli 2016

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt., atas rahmat, ridha, dan bimbingan-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Disertasi dengan judul: “Islam dan Negara: Studi Kasus Perumusan, Perdebatan, dan Kontroversi serta Peran Politik Muhammadiyah dan NU dalam Proses Pembuatan Perda 12 Tahun 2009 Kota Tasikmalaya.”

Disertasi dengan mengangkat tema besar Muhammadiyah dan NU ini merupakan komitmen saya selama ini untuk selalu berusaha mencari titik-titik konvergensi antara Muhammadiyah dan NU. Bagi saya, sebagai kekuatan Muslim *mainstream* di Indonesia, bahkan di Dunia Islam, ketika Muhammadiyah dan NU bisa berjalan seiring dan ada kohesivitas –dalam pengertian luas sebagai kelompok Muslim *mainstream*– yang mencoba dibangun dan dirawat secara serius, maka setengah persoalan umat dan bangsa Indonesia sudah teratasi.

Ternyata tidak mudah mencari titik-titik konvergensi dan membangun kohesivitas di antara Muhammadiyah dan NU. Dua persoalan yang selalu muncul sejak awal kelahiran Muhammadiyah (1912) dan NU (1926) dan kerap menjadi kerikil (meskipun tidak terlalu tajam) adalah persoalan politik dan masalah-masalah *khilafiyah* dan *furu'iyah* terkait masalah-masalah ubudiyah yang lebih berwajah *fiqh* dan bukan *syariat*. Meskipun ada kemajuan ke arah perbaikan menuju terjalinnya ukhuwah di antara dua kekuatan besar umat Islam ini, namun dua persoalan inilah yang selalu hadir di masyarakat. Dan dua persoalan ini sepertinya bukan sekedar *latent*, tapi juga *manifest*.

Meskipun tidak mudah, namun upaya untuk selalu mencari titik temu dan membangun kohesivitas harus terus dilakukan. Studi ini setidaknya menjadi salah satu upaya untuk mencari titik temu dan membangun kohesivitas, bahwa di balik perbedaan Muhammadiyah dan NU dalam masalah politik, ternyata bukan berarti tak ada titik persamaan yang bisa dipertemukan. Studi ini setidaknya menegaskan adanya persamaan titik temu terkait sikap politik yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah dan NU dalam menyikapi Perda Syariat di Kota Tasikmalaya.

Menilik ke belakang, sebenarnya tidak ada alasan bagi Muhammadiyah dan NU untuk tidak bisa membangun titik temu dan kohesivitas. Dari sisi aliran

teologi, Muhammadiyah dan NU sama-sama berasal dari rumpun Sunni, yang di antara cirinya, yaitu mempunyai kecenderungan untuk dekat dengan penguasa, dalam beragama mencoba mengambil posisi “tengahan” (*wasathiyah*), tidak ekstrim (*tatharuf*), dan toleran (*tasamuh*). Pendiri Muhammadiyah KH. Ahmad Dahlan dan pendiri NU KH. Hasyim Asy’ari adalah santri seperguruan ketika keduanya *nyantri* di Pesantren Langitan Tuban maupun Pesantren Soleh Darat Semarang. Keduanya juga pernah sama-sama *nyantri* di Makkah. Keduanya pula berasal silsilah keluarga yang sama dengan titik pertemuan di Maulana Ainul Yaqin (Sunan Giri).

Ketika mendapati sulitnya mencari titik temu, terutama pada dua persoalan sebagaimana disebut di atas, terkadang saya merenung dengan sedikit fatalistik (*jabariyah*) bahwa mungkin ini “jalan terbaik” Allah untuk “memajukan” Muhammadiyah dan NU. Bisa dibayangkan bila Muhammadiyah dan NU selalu bersatu, berjalan seiring, yang akan terjadi adalah kemandekan (*jumud*), dan bahkan mungkin kemunduran. Anggap saja “perbedaan” Muhammadiyah dan NU sebagai cara Allah untuk membumikan firmanNya: *fastabiqul khairat*, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik.

Lagi pula berharap Muhammadiyah dan NU –dua institusi yang berbeda, juga tidak rasional, terlebih bila berkaca pada friksi yang kerap terjadi di internal Muhammadiyah maupun NU. Di Muhammadiyah pada era 1980-an dan dalam beberapa hal berlangsung hingga saat ini, masih kerap timbul friksi antara “Kubu Jakarta” dan “Kubu Yogyakarta”. Begitu pun dalam hal pandangan keagamaan di lingkup Pimpinan Muhammadiyah juga muncul friksi antara yang berhaluan *tatharuf*, baik liberal maupun konservatif dan yang berhaluan *wasathiyah*. Ada kelompok yang kontra Maulidan, tapi ada juga yang pro Maulidan. Ada yang membaca *basmalah* pada Surat al-Fatihah di saat salat dengan *sirri*, tapi ada pula yang membacanya dengan *jahr*.

Begitupun di tubuh NU juga –bahkan lebih sering– terjadi friksi. Antara KH. Wahab Hasbullah dan KH. Bisri Syamsuri (yang *notabene* kakak adik ipar dan keduanya pernah menjadi Rais Am) juga terjadi perbedaan dalam pandangan keagamaannya (*fiqh*). KH. Wahab Hasbullah dinilai lebih moderat, ketimbang KH. Bisri Syamsuri yang konservatif. Sempat terjadi juga friksi dan konflik di tubuh NU seiring munculnya “Kubu Cipete” (KH. Idham Chalid) dan “Kubu

Situbondo” (KH. As’ad Syamsul Arifin). Pasca Muktamar Cipasung 1994 timbul friksi yang begitu tajam antara Kubu Gus Dur dengan Kubu Abu Hasan, yang sempat memunculkan “NU tandingan” bernama KPPNU. dan terakhir muncul friksi dalam menyikapi pelaksanaan Muktamar Jombang 2015 antara Kubu Said Aqiel Siradj dan Kubu Hasyim Muzadi-Salahuddin Wahid (Gus Solah).

Selesainya penulisan Disertasi ini tentu tak mungkin bila tanpa bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga, *pertama*, kepada Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA. selaku Promotor, yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan teliti; Prof. Burhan Djabir Magenda, MA., Ph.D. yang sempat beberapa waktu lamanya menjadi Promotor; dan Chusnul Mar’iyah, Ph.D. selaku Co-Promotor, guru, dan sekaligus teman berdiskusi, yang selama ini dengan kesabaran dan ketulusannya telah memberikan banyak masukan selama proses bimbingan, sehingga Disertasi ini pun dapat terselesaikan. Terima kasih juga kepada Penguji Ahli Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA. dan Tim Penguji lainnya Dr. Kamaruddin, M.Si.; Dr. Isbodroini Suyanto, MA.

Kedua, ucapan terima kasih kepada Abangda Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA., Mas Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA., Mas Drs. Imam Addaruqutni, MA., Mas Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., Muhammad Izzul Muslimin, S.IP., kelimanya mantan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah, yang selama ini telah memberikan dukungan agar secepatnya menyelesaikan studi. Juga kepada guru dan “orang tua” Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP., Prof. Dr. Bahtiar Effendy, MA., Kanda Effendi Ishak, Bang Armyn Gultom, Mas Yendra Fahmi, Ahmad Rofiq, Mas Heru, Mas Khotibul Umam Wiranu, Mas Rosyid Hidayat, Iskandar Turusi, dan Faozan Amar. Kepada tiga sahabat saya yang selama ini menjadi teman diskusi membahas materi Disertasi saya: Andar Nubowo (tengah menyelesaikan Doktoral di EHESS Paris Prancis), Ahmad Fuad Fanani (tengah menempuh studi S3 di Toronto University), dan Ali Noer Zaman, saya juga mengucapkan terima kasih.

Ketiga, ucapan terima kasih kepada Mas Anas Urbaningrum, Bli Gede Pasek Suardika, Bung Andy Soebyakto, Mas Sudewa, Mas Firman Wijaya, Mbak Tia, S.J. Arifin, dan temen-teman seperjuangan di Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI); juga kepada teman-teman di Forum Keluarga Alumni (FOKAL

IMM); Sahabat-sahabat di dua Grup WA “Menara 62” dan “Islam Berkemajuan” yang selalu “heboh”, kadang penuh “ketegangan”, dan kaya *discourse*, yang dapat menggambarkan representasi peta ideologi politik dan keagamaan di lingkup Angkatan Muda Muhammadiyah. Juga sahabat-sahabat di Pimpinan Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB) MUI Pusat, dan Persaudaraan Muslim Griya Asri 2 (PMGA) Bekasi.

Keempat, terima kasih juga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH., beserta jajaran Rektorat, Dekan FISIP UMJ Dra. Endang Sulastri, M.Si., beserta jajaran Dekanat, dan para Ketua Program Studi di lingkungan FISIP UMJ, yang juga selalu memberikan dorongan untuk bisa secepatnya menyelesaikan studi. Juga kepada adik-adik IMM Komisariat FISIP dan Tim Asistensi Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) FISIP UMJ yang telah banyak membantu, terutama dalam mentranskrip hasil-hasil wawancara. Juga kepada Usni Hasanuddin dan Djoni Gunanto.

Kelima, ucapan terima kasih dan takdzimnya untuk Emanda tercinta Hj. Salamah Syamsuri yang selama ini dengan doa-doa tulusnya telah mengantarkan putranya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi. Juga kepada istri tercinta Hikmah Maemy Pramesti yang selama ini telah mendampingi, membantu, dan memberikan dukungan yang tak ternilai harganya, tidak saja dalam hal yang terkait dengan studi, tapi juga terkait dengan aktivitas lainnya. Terimakasih juga kepada nanda-nanda tercinta: Mumtaz ‘Azam El-Hamasy (1999), Hakam Ahimsa Rantissi (2004), dan Bassam Ahmed Asad (2010), yang sejak lahir kerap ditinggal “petualangan” organisasi abahnya, baik ketika aktif di Pemuda Muhammadiyah, Muhammadiyah, partai politik (PMB dan Partai Demokrat), dan PPI. Terima kasih juga untuk adik-adik saya: Shofiyullah, Muallimah, dan Inayah.

Keenam, ucapan terima kasih kepada Kang Agus Wahyudin Ketua Pansus Perda Nomor 12 Tahun 2009, sekarang Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, yang dengan ramah dan bersahabat menerima kami untuk wawancara, dan ikut memfasilitasi menyediakan data-data yang saya butuhkan, bahkan tidak jarang dengan sabarnya mau menerima telepon saya dan bahkan menelepon balik terkait dengan data tambahan yang saya perlukan; Mas Budi Ahdiat, teman dan pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Pansus Perda Nomor 12

Tahun 2009 dari Fraksi PAN, yang selalu dengan sabar menemani dan mengantar ke hampir semua *key informan*. Terima kasih juga kepada mantan Walikota Tasikmalaya Syarif Hidayat, yang berkenan menerima saya di kediamannya untuk kepentingan wawancara. Ucapan terima kasih kepada Ketua PD Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Iif Syamsul Arif; dan mantan Ketua PCNU Kota Tasikmalaya KH. Iman Suparman dan Ketua PCNU Kota Tasikmalaya KH. Didi Hudaya. Juga kepada Ketua MUI Kota Tasikmalaya KH. Acep Mubarak; dan penggagas Perda Syariat dan Koordinator PKPPSI KH. Miftah Fauzi yang begitu antusias menjelaskan seputar usulan Perda Syariat, terima kasih juga atas pemberian batu cincinnya. Ucapan terima kasih juga kepada *key informan* lainnya, baik dari perwakilan partai politik maupun ormas Islam lainnya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kepada semuanya saya mengucapkan terima kasih.

Akhirnya dengan selalu mengharap ridha Allah swt., saya persembahkan karya yang sederhana ini, semoga ada guna dan manfaat bagi yang membacanya. Sebagai insan yang *dhaiif*, tentu saya selalu bersedia menerima segala masukan dan kritik terkait dengan karya Disertasi ini. Terima kasih. Fastabiqul Khairat. Wallahul Musta'an.

Jakarta, Juli 2016

MMA

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ma'mun Murod
NPM : 0906649185
Program Studi : Ilmu Politik
Departemen : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ISLAM DAN NEGARA: Studi Kasus Perumusan, Perdebatan, dan Kontroversi serta Peran Politik Muhammadiyah dan NU dalam Proses Pembuatan Perda Nomor 12 Tahun 2009 di Kota Tasikmalaya** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juli 2016
Yang menyatakan :

(Ma'mun Murod)

ABSTRAK

Nama : Ma'mun Murod
Program : Ilmu Politik
Judul : Islam dan Negara: Studi Kasus Perumusan Perda Nomor 12 Tahun 2009 Kota Tasikmalaya dan Peran Politik Muhammadiyah dan NU.

Disertasi membahas perumusan Perda Nomor 12 Tahun 2009 Kota Tasikmalaya dan peran Muhammadiyah dan NU. Disertasi ini untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana perumusan Perda Nomor 12 Tahun 2009?; Apa saja kontroversi yang terdapat dalam Perda Nomor 12 Tahun 2009?; Bagaimana peran Muhammadiyah dan NU dalam pembuatan Perda Nomor 12 tahun 2009?; Bagaimana perdebatan Perda Syariat Islam dalam konteks relasi Islam dan negara di Indonesia?

Studi ini memakai metode kualitatif dengan jenis penelitian *instrumental case study*). Teknik pengumpulan datanya *in depth interview*, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data memakai pendekatan Sarantakos.

Ada tiga teori yang digunakan, yaitu Teori Pemikiran dan Pergerakan Islam yang ditawarkan Fazlur Rahman sebagai teori utama, Teori Dekonfessionalisasi Islam yang ditawarkan Nieuwenhuijze dan Teori relasi Islam dan Negara yang ditawarkan oleh al-Mawardi dan An-Na'im sebagai teori pendukung.

Temuan studi ini, didapati tiga model dukungan terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2009, yaitu model idealis, mereka yang memiliki wacana atau gagasan Syariat Islam dan juga bersemangat untuk menerapkan Syariat dan prinsip-prinsip Islam. Model idealis terbagi dua, yaitu idealis formalis di mana Fraksi PPP, PBB, dan PKS termasuk di dalamnya dan idealis substantif di mana PAN dan PKB masuk di dalamnya; Model pragmatis, mereka yang mendukung Perda Syariat semata dilandasi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis, terdiri atas Fraksi PDIP, Golkar, dan BRD. Ditemukan beberapa kontroversi isi Perda Nomor 12 Tahun 2009: penamaan Perda; aqidah dan pemeliharaannya; Syariat Islam dan ibadah; ulama dan *wilayatul hisbah*; perempuan dan aborsi; aliran sesat; dan ketentuan pidana. Terkait peran politik Muhammadiyah dan NU, didapati empat peran politik: penjaga moderasi keagamaan; pemberi legitimasi keagamaan; *interest group* dan *pressure group*, dan *opinion leader*. Temuan lainnya terkait perdebatan Perda Syariat, yaitu keterkaitan penolakan terhadap Perda Syariat dengan Islamophobia; terkait resistensi atau penerimaan terhadap perda syariat; keterkaitan antara perda syariat dengan ideologi partai politik; perda syariat sebagai produk demokrasi. terkait perbedaan peran Muhammadiyah dan NU sebagai *jam'iyah* dan *jamaah*

Implikasi teori dari studi ini: Melihat peran Muhammadiyah dan NU tidak cukup dari sisi sebagai *jam'iyah* (organisasi), penting juga dilihat dari sisi *jamaah* (paguyuban); Negara harus memastikan dalam relasinya dengan Islam (dan juga agama lainnya) mengedepankan relasi simbiotik, bukan relasi formalistic dan sekularistik.

Kata kunci : Perda Syariat, kontestasi, Islam *mainstream* dan *non mainstream*, Muhammadiyah dan NU *jam'iyah* dan Muhammadiyah dan NU *jamaah*, relasi Islam dan Negara, dan Dekonfessionalisasi Islam.

ABSTRACT

Name : Ma'mun Murod
Department : Political Science
Subject : Islam and State: Study Case on the Formulation of Regional Regulation No.12 of 2009 in Tasikmalaya and the Political Roles of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama

This dissertation discusses the formulation of Regional Regulation No.12 of 2009 in Tasikmalaya as well as the roles of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama. Several questions will be answered by this study. First, how did the Regional Regulation No.12 of 2009 come into existence? Second, what controversies are contained in Local Regulation No.12 of 2009? Third, what were the roles of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in the formulation? Last, how was the Syari'a regional regulation debate in the context of relations between the State and Islam in Indonesia?

The qualitative method with an instrumental case study is used by this study, while the data collection technique ranges from in-depth interview, literature review, to documentation. Furthermore, the Sarantakos approach is used in data analysis.

Several theories are used in this study. Fazlur Rahman's theory of Islamic thought and movement is used as the main theory. The supporting theories are Niewunhijze's theory of deconfessionalism, al-Mawardi's and An-Naim's theory of Islam and state relations.

The principal findings shows three supporting models on Regional Regulation No.12 of 2009—the (formal and substantive) idealistic model and the pragmatic model. The idealistic model contains the Islamic idea and is eager to implement the Syari'a law and the Islamic principles. In addition, the idealistic model is branched into two sub-groups which are formal idealism and substantive idealism. PPP, PBB, and PKS are formal idealists, while PAN and PKB are substantive idealists. The pragmatic model are those that support the Syari'a local regulation because of their interests. The several political party included in the pragmatic model are PDIP, Golkar, and BRD. There are numerous controversies in Regional Regulation No.12 of 2009 are (1) the process in which the local regulation is named, (2) the beliefs and maintenance, (3) Islamic Syari'a and worship, (4) theologians and *wilayatul hisbah*, (5) women and abortion, (6) heresies, and (7) criminal provisions. In terms of Muhammadiyah' and Nahdlatul Ulama's roles, four major political roles are evident: (1) guardian of religious moderation, (2) giver of religious legitimacy, (3) interest and pressure group, and (4) opinion leader. Other findings related to the Syari'a law debate are (1) the rejection towards Syaria's law due to Islamophobia, (2) resistance and acceptance towards Syari'a Law, (3) relationship between Syari'a regional regulation and the ideologies of political parties, (4) Syari'a regional regulation as a product of democracy, and (5) the difference between the roles of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama as

jam'iyah and *jamaah*, respectively.

There are two theoretical implications of this study: (1) Seeing Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama's roles as a *jam'iyah* would be insufficient, so looking at the roles from the *jamaah* point of view is necessary, and (2) the state has to ensure that its relationship with Islam (and other religion) is symbiotic, not formal and secular.

Keywords: Syari'a regional regulation, dispute, mainstream and non-mainstream Islam, *jam'iyah* Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama and *jamaah* Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama, Islamic and state relations, and Islamic de-confessionalism

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | xiii |
| ABSTRAK | xv |
| DAFTAR ISI | xix |
| DAFTAR TABEL | xxiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxv |
| GLOSSARY | xxvii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup | 4 |
| 1.3. Pertanyaan Penelitian | 12 |
| 1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 12 |
| 1.5. Signifikansi Studi | 13 |
| 1.6. Lokasi Studi | 15 |
| 1.7. Kajian Literatur | 16 |
| 1.8. Kerangka Teori | 26 |
| 1.8.1. Teori Pemikiran dan Pergerakan Islam | 26 |
| 1.8.2. Dekonfessionalisasi Islam | 33 |
| 1.8.3. Relasi Islam dan Negara | 35 |
| 1.8.3.1. Model Integralistik | 36 |
| 1.8.3.2. Model Sekularistik | 37 |
| 1.8.3.3. Model Substantifistik | 40 |
| 1.8.3.4. Model Simbiotik | 44 |
| 1.9. Metode Penelitian | 47 |
| 1.9.1. Pendekatan Studi | 48 |
| 1.9.2. Teknik Pengumpulan Data | 48 |
| 1.9.3. Analisis Data | 50 |
| 1.9.4. Kekuatan Studi | 50 |
| 1.10. Sistematika Penulisan | 51 |
| II. SYARIAT ISLAM DI INDONESIA DAN PERDA SYARIAT KOTA TASIKMALAYA | 53 |
| 2.1. Pengantar | 53 |
| 2.2. Syariah Islam dalam Sistem Hukum Dunia dan Politik Hukum di Indonesia | 55 |
| 2.3. Syariat Islam Masa Kerajaan dan Kolonial | 59 |
| 2.4. Mendamba Kebersatuan Islam dan Negara | 70 |
| 2.5. Perjuangan Islam sebagai Ideologi Negara | 73 |
| 2.6. Adaptasi dengan Sistem yang Berubah | 76 |
| 2.7. Mencoba Mengembalikan Piagam Jakarta | 81 |
| 2.8. Semarak Islam Syariat di Level Lokal | 84 |

| | | |
|------------|--|-----|
| III | ISLAM DAN POLITIK DI KOTA TASIKMALAYA | 93 |
| 3.1. | Pengantar | 93 |
| 3.2. | Sejarah Kota Kasikmalaya | 94 |
| 3.3. | Geografi Kota Tasikmalaya | 97 |
| 3.4. | Agama, Sosial, dan Masyarakat Kota Tasikmalaya | 98 |
| 3.5. | Politik Islam di Kota Tasikmalaya | 100 |
| 3.5.1. | Periode Pasca Kemerdekaan | 100 |
| 3.5.2. | Periode Orde Baru | 106 |
| 3.5.3. | Periode Pasca Orde Baru | 112 |
| 3.6. | Muhammadiyah dan NU di Kota Tasikmalaya | 118 |
| 3.6.1. | Muhammadiyah | 118 |
| 3.6.2. | Nahdlatul Ulama | 125 |
| IV | KONTROVERSI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2009 | 137 |
| 3.1. | Pengantar | 137 |
| 3.2. | Tujuh Raperda Syariat Islam | 139 |
| 3.2.1. | Raperda Pelaksanaan Syariat Islam | 139 |
| 3.2.2. | Raperda Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Badan Eksekutif, Legislatif, dan Instansi Lainnya | 141 |
| 3.2.3. | Raperda Peradilan Syariat Islam | 143 |
| 3.2.4. | Raperda Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam | 145 |
| 3.2.5. | Raperda Minuman Khamar dan sejenisnya | 147 |
| 3.2.6. | Raperda Khalwat (Mesum) | 147 |
| 3.2.7. | Raperda Maisir (Perjudian) | 149 |
| 3.3. | Pro dan Kontra Perda Nomor 12 Tahun 2009 | 149 |
| 3.4. | Beberapa Kontroversi dalam Perda Nomor 12 Tahun 2009 | 165 |
| 3.4.1. | Penamaan Perda | 165 |
| 3.4.2. | Aqidah dan Pemeliharaannya | 168 |
| 3.4.3. | Syariat Islam dan Ibadah | 172 |
| 3.4.4. | Ulama dan Wilayahul Hisbah | 174 |
| 3.4.3. | Perempuan dan Aborsi | 175 |
| 3.4.2. | Aliran Sesat | 183 |
| 3.4.3. | Ketentuan Pidana | 190 |
| V. | PERUMUSAN DAN KONTESTASI ANTAR-FRAKSI DI DPRD KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMBAHASAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2009 | 195 |
| 5.1. | Pengantar | 195 |
| 5.2. | Euphoria Demokrasi dan Kebutuhan Lokal Kota Tasikmalaya | 196 |
| 5.3. | <i>Ajengan Bendo</i> dan Ormas <i>Non-Mainstream</i> : Penggagas Syariat Islam | 202 |
| 5.4. | Identifikasi Fraksi Pendukung Perda Nomor 12 Tahun 2009 | 208 |
| 5.4.1. | Idealis Formalis | 209 |
| 5.4.2. | Idealis Substantif | 211 |
| 5.4.3. | Idealis Pragmatis | 216 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 5.5. | Kontestasi Politik Antar-Fraksi di DPRD Kota Tasikmalaya | 218 |
| 5.5.1. | Kelompok Fraksi Idealis-Formalis | 219 |
| 5.5.2. | Kelompok Fraksi Idealis-Substantif | 227 |
| 5.5.3. | Kelompok Fraksi Pragmatis | 232 |
| VI. | MUHAMMADIYAH, NU, DAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2009 | 243 |
| 6.1. | Pengantar | 243 |
| 6.2. | Posisi Politik Muhammadiyah dan NU terhadap Formalisasi Syariat Islam. | 245 |
| 6.3. | Peran Politik Muhammadiyah dan NU dalam Pembuatan Perda Nomor 12 Tahun 2009 | 253 |
| 6.3.1. | Penjaga Moderasi Keagamaan | 254 |
| 6.3.2. | Pemberi Legitimasi Keagamaan | 261 |
| 6.3.3. | <i>Civil Society</i> | 268 |
| 6.3.3.1. | “Pengawal” Demokrasi | 271 |
| 6.3.3.2. | <i>Legal Drafting</i> | 278 |
| 6.3.4. | <i>Interest Group dan Pressure Group</i> | 280 |
| 6.3.4.1. | <i>Political Pressure</i> | 282 |
| 6.3.4.2. | <i>Lobby</i> | 284 |
| 6.3.5. | <i>Opinion Leader</i> | 288 |
| VII. | PERDEBATAN PERDA SYARIAT ISLAM DALAM RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA | 293 |
| 7.1. | Pengantar | 293 |
| 7.2. | Perda Syariat dan Islamophobia: Analisis Simbol dan Substansi | 294 |
| 7.3. | Perda Syariat: Resistensi dan Penerimaan | 302 |
| 7.4. | Perda Syariat dan Ideologi Partai Politik | 309 |
| 7.5. | Perda Syariat Produk Demokrasi | 315 |
| 7.6. | Muhammadiyah, NU, dan Perda Syariat: Perbedaan <i>Jam`iyah</i> dengan <i>Jamaah</i> | 325 |
| VIII. | PENUTUP | 337 |
| 8.1. | Kesimpulan | 337 |
| 8.2. | Implikasi Teoritis | 345 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 353 |
| | DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 375 |

DAFTAR TABEL

| | | Hal. |
|-------------|---|------|
| Tabel 1.1. | Perda Syariah Kota Tasikmalaya | 5 |
| Tabel 1.2. | Peta Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tasikmalaya atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 | 9 |
| Tabel 1.3. | Varian Sikap Ormas Islam atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 | 11 |
| Tabel 1.4. | Hasil Pemilu 1955 di Jawa Barat (lima partai besar) | 15 |
| Tabel 1.5. | Perolehan Kursi DPRD Kota Tasikmalaya Pemilu 2009 dan 2004 | 16 |
| Tabel 1.6. | Model Relasi Agama dan Negara | 47 |
| Tabel 1.7. | Key Informan Tokoh Ormas Islam | 49 |
| Tabel 1.8. | Key Informan Tokoh Partai Politik | 49 |
| Tabel 2.1. | Jumlah Perda dan Peraturan Lain Berwajah Syariat | 86 |
| Tabel 2.2. | Persentase Penduduk Muslim setiap Negara yang Menginginkan Syariat Islam sebagai Hukum Negara | 90 |
| Tabel 3.3. | Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2010 | 97 |
| Tabel 3.4. | Perbatasan Kota Tasikmalaya | 98 |
| Tabel 3.5. | Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin 2010 | 98 |
| Tabel 3.6. | Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga 2006-2010 | 99 |
| Tabel 3.7. | Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2010 | 99 |
| Tabel 3.8. | Jumlah Sarana Ibadah di Kota Tasikmalaya 2010 | 100 |
| Tabel 3.9. | Lima Besar Partai Hasil Pemilu 1955 DPR RI | 104 |
| Tabel 3.10. | Perolehan Suara dan Kursi Pemilu Konstituante 1955 | 105 |
| Tabel 3.11. | Perolehan Suara dan Kursi Pemilu 1955 Propinsi Jawa Barat | 105 |
| Tabel 3.12. | Empat Besar Hasil Pemilu 1955 di Daerah Priangan | 106 |
| Tabel 3.13. | Hasil Pemilu 1971 | 108 |
| Tabel 3.14. | Hasil Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 | 109 |
| Tabel 3.15. | Lima Besar Hasil Pemilu 1971 Propinsi Jawa Barat | 109 |
| Tabel 3.16. | Hasil Pemilu 1971 di Kecamatan Kota Tasikmalaya untuk DPRD II | 110 |
| Tabel 3.17. | Hasil Pemilu Jawa Barat 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 | 111 |
| Tabel 3.18. | Perolehan Suara dan Kursi Partai Islam Pemilu 1999 sampai Pemilu 2014 | 112 |
| Tabel 3.19. | Hasil Pemilu 1999 Kabupaten Tasikmalaya | 114 |
| Tabel 3.20. | Kursi DPRD Kota Tasikmalaya Pemilu 2004, 2009, dan 2014 | 115 |
| Tabel 3.21. | Perolehan Kursi Partai Afiliasi Warga Muhammadiyah | 125 |
| Tabel 3.22. | Perolehan Kursi PKB dan PPP di Kota Tasikmalaya | 135 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Tabel 4.1. | Fraksi DPRD Kota Tasikmalaya yang Hadir pada Rapat Paripurna | 155 |
| Tabel 4.2. | Fraksi DPRD Kota Tasikmalaya Yang Hadir pada Rapat Paripurna | 156 |
| Tabel 4.3. | Pansus Raperda Syariat Islam | 156 |
| Tabel 4.4. | Susunan Pimpinan dan Anggota Pansus Raperda Syariat Islam | 157 |
| Tabel 4.5. | Fraksi yang Hadir | 158 |
| Tabel 4.6. | Anggota DPRD yang Hadir | 159 |
| Tabel 4.7. | Anggota DPRD Yang Tidak Hadir | 159 |
| Tabel 4.8. | Persoalan-Persoalan Pokok dalam Raperda Syariat Islam | 163 |
| Tabel 4.9. | Nama Raperda/Perda Draft PKPPSI, Raperda, dan Perda Nomor 12 Tahun 2009 | 168 |
| Tabel 4.10. | Aqidah | 171 |
| Tabel 4.11. | Pemeliharaan Aqidah | 172 |
| Tabel 4.12. | Syariat Islam | 173 |
| Tabel 4.13. | Ibadah | 174 |
| Tabel 4.14. | Ulama | 174 |
| Tabel 4.15. | Pengawas | 175 |
| Tabel 4.16. | Tindakan Tercela | 190 |
| Tabel 4.17. | Ketentuan Pidana | 191 |
| Tabel 5.1. | Identifikasi Pendukung Perda Syariat | 218 |
| Tabel 5.2. | Sikap Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tasikmalaya Atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 | 218 |
| Tabel 5.3. | Pandangan Fraksi Idealis-Formalis | 225 |
| Tabel 5.4. | Pandangan Fraksi Idealis-Substantif | 231 |
| Tabel 5.5. | Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi Pragmatis terhadap Perda Syariat Islam | 238 |
| Tabel 5.6. | Sikap Akhir Fraksi-Fraksi Atas Perda Nomor 12 Tahun 2009 | 241 |
| Tabel 7.1. | Kekuatan Partai di DPRD dalam Mengadopsi Perda Syariat 1999–2009 | 310 |
| Tabel 7.2. | Model Dukungan Muhammadiyah dan NU terhadap Perda Syariat. | 333 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Raperda PKPPSI tentang Pelaksanaan Syariat Islam
- Lampiran 2 Raperda PKPPSI tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Badan Eksekutif, Legislatif, dan Instansi Lainnya
- Lampiran 3 Raperda PKPPSI tentang Peradilan Syariat Islam
- Lampiran 4 Raperda PKPPSI tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
- Lampiran 5 Raperda PKPPSI tentang Minuman Khamar dan sejenisnya
- Lampiran 6 Raperda PKPPSI tentang Khalwat (Mesum)
- Lampiran 7 Raperda PKPPSI tentang Maisir (Perjudian)
- Lampiran 8 Raperda Walikota tentang Pelaksanaan Syariat Islam
- Lampiran 9 Raperda Walikota tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam
- Lampiran 10 Raperda Walikota tentang Minuman Khamar dan sejenisnya
- Lampiran 11 Raperda Walikota tentang Khalwat (Mesum)
- Lampiran 12 Raperda Walikota tentang Maisir (Perjudian)
- Lampiran 13 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009.
- Lampiran 14 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009.
- Lampiran 15 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014
- Lampiran 16 Surat Walikota Tasikmalaya

Glossary

| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Aurat</i> | Bagian dari tubuh manusia yang diharamkan untuk dilihat apalagi dipegang. Untuk wanita, seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali kedua telapak tangan dan muka (pada penjelasan lain seluruhnya adalah aurat kecuali alat penglihatan). Sedangkan untuk pria adalah bagian pusar (perut) kebawah hingga di bawah lutut. |
| <i>Ahl-u al-halli wa al-aqdhi</i> | Dimengerti sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Tugasnya adalah memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Ridha menyebut Ahl-u al-hall wa al-aqdhi sama dengan ulil amri, yaitu mereka yang mendapat kepercayaan dari rakyat, seperti ulama, pemimpin militer, pemimpin pekerja, elite parpol dan tokoh wartawan. |
| <i>Bahsul Masail Diniyah</i> | Forum yang secara khusus diadakan untuk membahas berbagai masalah keagamaan yang bersifat kontemporer di masyarakat yang secara hukum Islam (<i>fiqh</i>) menuntut adanya kepastian hukum. Dalam tradisi NU, forum ini biasanya diadakan sela-sela pelaksanaan Munas Alim Ulama NU atau juga bisa diadakan pada forum yang memang diadakan khusus untuk itu, yang melibatkan kiai-kiai dan kalangan pesantren. |
| BAMAG | Badan Musyawarah Antar-Gereja. |
| BMI | Bank Muamalat Indonesia. |
| BIN | Badan Intelijen Negara |
| BPUPKI | Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia |
| CCC | Central Comitte Chilafah. |
| DDII | Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia |
| DI/TII | Darul Islam/Tentara Islam Indonesia |
| DPA | Dewan Pertimbangan Agung |
| DPR | Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPRD | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| DPR-GR | Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong |
| <i>Fiqh</i> | Produk hukum dalam Islam sebagai tafsir atas syariat Islam. |
| <i>Firqah</i> | Aliran, biasanya untuk menyebut aliran politik atau aliran keagamaan dalam Islam. |
| FMPU | Forum Masyarakat Peduli Umat Kota Tasikmalaya. |
| FPI | Front Pembela Islam |
| FSPP | Forum Silaturahmi Pondok Pesantren |
| <i>Fuqaha</i> | Ahli <i>fiqh</i> . |

| | |
|-------------------------------------|--|
| GAI | Gerakan Ahmadiyah Indonesia |
| GARIS | Gerakan Reformis Islam (Islamic Reformist movement), di Cianjur. |
| GAM | Gerakan Anti Maksiat |
| Golkar | Golongan Karya |
| GP Ansor | Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. |
| GUPPI | Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam |
| <i>Hisab</i> | Metode penentuan tanggal dengan menggunakan teknik hitungan tertentu. |
| HMI | Himpunan Mahasiswa Islam |
| HTI | Hizbut Tahrir Indonesia |
| <i>I'tidal</i> | Tegak lurus. |
| IAIN | Institut Agama Islam Negeri |
| <i>Ijtihad</i> | Dari segi bahasa, arti <i>ijtihad</i> berarti “mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan.” Kata <i>ijtihad</i> memang tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dikerjakan dengan susah payah. Sedangkan menurut istilah, <i>ijtihad</i> ialah “mengerahkan segala potensi dan kemampuan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum-hukum syariah” |
| <i>Ikhwan al-Muslimun</i> | Persaudaraan Kaum Muslimin, nama sebuah partai di Mesir. Pendirinya adalah Muhammad Hasan al-Banna, Muhammad Sayyid Qutb. |
| Imam madzhab | Imam madzhab biasanya merujuk pada empat imam utama yang begitu masyhur dalam bidang <i>fiqh</i> , yaitu Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafii, dan Imam Hambali |
| IMM | Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah |
| <i>Islam al-din wa al-dawlah</i> | Islam adalah agama dan juga negara. |
| <i>Islam al-din wa al-siyasiyah</i> | Islam adalah agama dan juga politik |
| JAI | Jamaah Ahmadiyah Indonesia |
| <i>Jamaah</i> | Paguyuban |
| <i>Jam'iyah</i> | Organisasi |
| <i>Jinayah</i> | Perbuatan dosa, salah atau jahat. |
| KAMI | Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia |
| <i>Khilafah Islamiyah</i> | Pemerintahan Islam, pemimpin pemerintahannya disebut <i>Khalifah</i> . |
| <i>Khulafa al-Rasyidin</i> | Pemimpin-pemimpin (atau pengganti-pengganti) yang mendapat petunjuk atau bisa juga dimengerti sebagai pemimpin yang bijaksana. Khulafa al-Rasyidin merujuk pada empat <i>khalifah</i> pasca-Muhammad saw: Abu Bakar Al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. |
| KISDI | Dewan Dakwah Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. |
| KP2SP | Kelompok Penulis Pembaca Surat kabar Priangan. |

| | |
|--------------|---|
| KPPSI | Komite Persiapan Penegak Syariat Islam di Sulawesi Selatan. |
| KPSI | Komite Penegakan Syariat Islam. |
| KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| KUII | Kongres Umat Islam Indonesia |
| LDII | Lembaga Dakwah Islam Indonesia |
| LHKP | Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik |
| LKaHAM | Lembaga Kajian Agama dan HAM, lembaga kajian di Kota Tasikmalaya yang pada mulanya berafiliasi ke LKiS. |
| LKiS | Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta |
| LPPi | Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam di Cianjur. |
| LP3SyI | Lembaga Pengkajian, Penegakkan, dan Penerapan Syariat Islam. |
| LSM | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MA | Mathlaul Anwar |
| Maksum | Terbebas dari dosa kecil dan besar, sebutan yang hanya disandang oleh para rasul dan nabi. Namun di kalangan Syi'ah, pemimpin mereka pun disebutnya sebagai maksum. |
| Masyumi | Majelis Syura Muslimin Indonesia |
| MIAI | Majlisul Islam A'la Indonesia, Majelis Tertinggi Islam Indonesia |
| MMI | Majelis Mujahidin Indonesia |
| MPR | Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| MPU | Majelis Permusyawaratan Ulama |
| MPRS | Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara |
| Muammalah | Muamalah berasal dari kata <i>معاملة</i> bentuk masdar dari kata <i>يعامل - يعامل - عامل</i> yang mempunyai arti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan pengertian muamalah secara istilah dibagi menjadi dua: muamalah dalam pengertian luas sebagai aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, yang menurut Ibnu Abidin meliputi lima bidang: <i>Mu'awadhah Maliyah</i> (hukum kebendaan); <i>Munakahat</i> (Hukum perkawinan); <i>Muhasanat</i> (Hukum Acara); Amanat dan 'Ariyah (Pinjaman); dan Tirkah (harta warisan). Dan muamalah dalam pengertian sempit, terkait dengan aturan tentang kegiatan ekonomi manusia. |
| Muhammadiyah | Didirikan pada tanggal 18 Nopember 1912 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. |
| MUI | Majelis Ulama Indonesia |
| Musytasar | Sebutan untuk penasehat dalam struktur kepengurusan di Nahdlatul Ulama. |

| | |
|----------------|---|
| NKRI | Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| NII | Negara Islam Indonesia |
| NU | Nahdlatul Ulama berdiri tanggal 31 Januari 1926. Tokoh pendirinya KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah. Kelahirannya merupakan reaksi atas gerakan pembaruan Islam di jazirah Arab awal abad ke-20. |
| PAN | Partai Amanat Nasional, partai yang pendiriannya atas dasar rekomendasi Tanwir Muhammadiyah Semarang, tahun 1998. |
| PARMUSI | Partai Muslimin Indonesia, selepas fusi ke dalam PPP namanya berubah menjadi Muslimin Indonesia (MI). |
| Partai Masyumi | Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia |
| Partai SUNNI | Salah satu partai di tubuh nahdliyin, yang diketuai oleh Abu Hasan. Sekedar diketahui, Abu Hasan adalah rival Gus Dur pada Muktamar NU Cipasung 1994, muktamar yang berlangsung cukup panas. |
| PBB | Fraksi Partai Bulan Bintang |
| PBB | Partai Bulan Bintang |
| PBR | Partai Bintang Reformasi. |
| PDII | Partai Demokrasi Islam Indonesia |
| PDI-P | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
| Perda | Peraturan Daerah |
| Perda Syariah | Kalau merujuk pada Perda Nomor 12 tahun 2009 Bab I Ketentuan Umum tentang pengertian syariat Islam, maka Perda Syariah dimengerti sebagai perda yang mendasarkan pada ajaran Islam yang merupakan tuntunan dan pedoman hidup bagi setiap perbuatan (amaliah) manusia, baik dalam relasinya dengan/dan sebagai makhluk ciptaan Allah maupun sebagai hamba Allah yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunah yang berlaku di suatu daerah. |
| Persis | Persatuan Islam |
| PERTI | Persatuan Tarbiyah Islamiyah |
| PGN | Perkumpulan Guru Ngaji. |
| Piagam Jakarta | Piagam Jakarta bisa disebut sebagai kesepakatan "jalan tengah" antara kelompok nasionalis-Islamis dan kelompok sekuler. Hal yang dipandang sebagai jalan tengah adalah rumusan kalimat yang berbunyi: "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." |
| Piagam Madinah | Piagam yang dibuat Muhammad saw atas dasar kesepakatan dengan berbagai kalangan di Madinah tahun 622 M. Piagam yang terdiri atas 47 Pasal ini memuat pasal-pasal terkait upaya penghentian pertikaian dua bani yang sangat berpengaruh di Madinah, yaitu Bani 'Aus dan Bani Khazraj. |

Piagam Madinah juga menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum muslimin, kaum Yahudi dan komunitas penyembah berhala di Madinah, sehingga membuat mereka menjadi satu kesatuan komunitas yang disebutnya sebagai ummah. Piagam Madinah kerap disebut sebagai piagam yang kualitas dan substansi isinya jauh melebihi *Declaration Universal of Human Right*. Piagam Madinah ini menjadi landasan bagi kehidupan, bermasyarakat, dan bernegara masyarakat Madinah kala itu di bawah kepemimpinan Muhammad saw.

| | |
|----------------------------|--|
| PII | Partai Islam Indonesia. |
| PK | Partai Keadilan, yang kemudian berubah nama menjadi PKS (lihat di bawah). Perubahan nama ini karena PK tidak berhasil memenuhi ambang bawah (<i>electoral threshol</i>) dalam hal perolehan suara, yaitu sebesar 2,5 persen suara. |
| PKB | Partai Kebangkitan Bangsa, yang kelahirannya dibidani oleh Nahdlatul Ulama. |
| PKI | Partai Komunis Indonesia |
| PKPPSI | Presidium Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam |
| PKPU | Pos Keadilan Peduli Ummat |
| PKS | Partai Keadilan Sejahtera |
| PKU | Partai Kebangkitan Umat |
| PMI | Persatuan Muslimin Indonesia |
| PMII | Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, organisasi kemahasiswaan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama |
| PNI | Partai Nasional Indonesia |
| PNU | Partai Nahdlatul Ummat |
| PP | Peraturan Pemerintah |
| PPIM | Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah. |
| PPKI | Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia |
| PPP | Partai Persatuan Pembangunan |
| PSI | Partai Sosialis Indonesia |
| PSII | Partai Sarekat Islam Indonesia |
| PUI | Persatuan Umat Islam |
| Qanun | Undang-undang atau dalam konteks studi ini disebut juga dengan Peraturan Daerah. Bila pembentukan <i>qanun</i> bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah disebut dengan <i>qanun syar'i</i> . Tapi bila bersumber dari pemikiran manusia atau sumber lain selain wahyu dinamakan <i>qanun wadh'i</i> . |
| <i>Rahmatan lil alamin</i> | Inti agama Islam, yaitu menjadi rahmat bagi semua alam. |
| <i>Rukyat</i> | Metode penentuan tanggal dengan cara melihat langsung bulan. |

| | |
|---------------------------|---|
| RUU | Rancangan Undang-Undang |
| SDI | Sarekat Dagang Islam. |
| SI | Sarekat Islam. |
| SMI | Sekolah Menengah Islam. |
| SPK | Sekolah Perawat Kesehatan. |
| STAI | Sekolah Tinggi Agama Islam. |
| STHG | Sekolah Tinggi Hukum Galunggung |
| STIA | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. |
| STAINU | Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama |
| STIK | Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan. |
| Syariat | Dalam kajian hukum Islam, istilah syariah dibedakan atas dua hal: syariah dalam arti sempit, yang berarti teks-teks al-Qur'an atau hadis yang menyangkut masalah hukum normatif; dan syariah dalam arti luas, yang berarti teks-teks wahyu atau hadis yang menyangkut masalah aqidah (keimanan), hukum, dan akhlak. Dalam hal ini syariah berarti teks ajaran Islam secara keseluruhan. |
| Syariah | Sebutan jabatan untuk legislatif di NU. |
| <i>Takzir</i> | Suatu bentuk hukuman |
| <i>Takfiri</i> | Kelompok atau orang yang dengan gampang suka mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda pandangan keagamaannya |
| Tanfidziyah | Sebutan jabatan untuk “pelaksana” (eksekutif) di NU |
| <i>Tasâmuh</i> | Toleran dalam menyikapi setiap perbedaan. |
| <i>Tatharruf</i> | Ekstrim |
| <i>Tauhid</i> | Secara bahasa (lughat) artinya menjadikan sesuatu esa. Maksudnya adalah mempercayai bahwa Allah itu esa. |
| <i>Tawassuth</i> | Moderat, sikap tengah, tidak ekstrim kiri atau kanan. |
| <i>Tawâzun</i> | Seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil <i>'aqli</i> (dalil bersumber dari akal pikiran manusia) dan dalil <i>naqli</i> (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits). |
| TSM | Tasikmalaya Solidarity of Muslim |
| UIN | Universitas Islam Negeri |
| UU | Undang-Undang |
| UUD | Undang-Undang Dasar |
| UNIGA | Universitas Garut |
| <i>Wilayat-i al-faqih</i> | <i>Persian, wilayat-i faqih; Arabic, al-wilaya al-faqih. Wilayat al-Faqih</i> diartikan sebagai “kekuasaan para <i>faqih</i> ” atau ahli hukum Islam. Ini khas di kalangan <i>Syi'ah</i> . Dengan sistem <i>Wilayat al-Faqih</i> , maka negara Islam akan menjamin keadilan sosial, demokrasi yang sebenarnya dan kemerdekaan yang murni. Islam dan pemerintah |

Wilayatul Hisbah

Islam adalah fenomena Ilahi, yang penggunaannya menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebuah sistem pemerintahan yang mengamalkan hukum Tuhan, yang mendapat pengawasan dari para ahli hukum agama (*faqh*).

Satuan tugas yang membantu polisi dalam urusan penegakan Syariat Islam.